

**STUDI PERBANDINGAN POLA ALOKASI LAHAN, PENGELUARAN BERAS
DAN POLA KONSUMSI PANGAN ANTARA PETANI UBI KAYU DI DESA PELAKSANA
DAN NON PELAKSANA PROGRAM MP3L DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

*(Land Allocation Pattern, Rice Spending, and Food Consumption Patterns of Cassava Farmers in
Implementer and Non Implementer Village of MP3L programme in South Lampung Regency)*

M Imacullata Santa De Vega Indiako, R Hanung Ismono, Achdiansyah Soelaiman

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No.1
Bandar Lampung 35145 Telp. 082180082652, e-mail: mariaimacullatavega@gmail.com

ABSTRACT

The purposes of this research are to compare: the allocation of land of cassava, the spending of rice and food consumption patterns, between cassava farmers in the village of implementers and non-implementers of the MP3L (Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal) Programme in South Lampung regency. The research was conducted in Pancasila village and Negara Ratu village, Natar district, South Lampung regency. The number of respondents in the research is 44 people, consisting of 22 cassava farmers in the Pancasila village and 22 of cassava farmers in Negara Ratu village. Analysis method used in this study is a quantitative descriptive. The results showed that: the allocation of land to plant cassava in Negara Ratu village is wider than in Pancasila village. The land allocation for planting cassava likely caused by the need of farmers to consume cassava and the guarantee of the markets. The average household rice spending at Pancasila village was Rp858,303.03 per capita per year, while the average household rice spending at Negara Ratu village was Rp1,044,121.77 per capita per year. Significant of that difference value was caused by the customs of households at Pancasila village to consume cassava by processing daily, excluding Beras Siger. The desirable food pattern (PPH) score of cassava farmers at Pancasila village (87.8) was higher than PPH score of cassava farmers at Negara Ratu village (80.5). Reduction of rice has occurred at Pancasila village, but it was not caused by substitution of rice by Beras Siger.

Key words: cassava farmers, consumption patterns, land allocation, MP3L

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan akan pangan. Penelitian Ariani (2010) menghasilkan bahwa pola konsumsi pangan pokok masyarakat Indonesia masih berupa pola pangan tunggal yaitu beras. Ketergantungan untuk mengonsumsi beras berdampak negatif pada masyarakat itu sendiri serta perekonomian negara. Belakangan diketahui bahwa kelebihan asupan karbohidrat dalam tubuh dapat mengakibatkan serangan berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, dan obesitas. Hal lain yang menjadi dampak adalah tingginya angka impor beras Indonesia untuk memenuhi permintaan yang berpengaruh pada stabilitas perekonomian negara.

Pangan alternatif kemudian dimunculkan sebagai bentuk pengurangan ketergantungan mengonsumsi beras yang berimbas bagi masyarakat hingga perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan penganekaragaman jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia dengan tetap memperhatikan kuantitas dan kualitas dari makanan tersebut. Kebijakan

tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15/Permentan/OT. 140/2/2013 tentang Peningkatan Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Suhardjo dalam Hanani (2009) menyatakan bahwa pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berhubungan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan dan diversifikasi produksi pangan. Salah satu bentuk diversifikasi pangan yang mencakup lingkup diversifikasi konsumsi dan produksi pangan dalam rangka pengurangan jumlah konsumsi beras masyarakat adalah adanya Program Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (Program MP3L) yang dicanangkan untuk mendukung kebijakan diversifikasi pangan dengan langkah mengembangkan sumber daya wilayah yang tersedia untuk menjadi pangan pokok lokal bagi masyarakat, dimana di Provinsi Lampung berbasis pada komoditas ubi kayu. Di Provinsi Lampung, program dilaksanakan mulai tahun 2013 dimana Desa Pancasila Kecamatan Natar merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang menjadi pelaksana program tersebut. Hasil dari program ini

adalah terciptanya produk sandingan beras berbahan dasar ubi kayu segar yang dinamakan Beras Siger.

Program MP3L terlaksana berlandaskan pada dua tujuan utama. Tujuan pertama adalah mendorong masyarakat untuk kembali meningkatkan proporsi pangan sumber karbohidrat lokal sebagai pangan pokok sandingan beras dan terigu. Tujuan kedua ialah menyediakan pangan pokok lokal bagi masyarakat dengan menumbuhkan kelembagaan Usaha Kecil Menengah (UKM) produsen dan/atau industri pengolahan pangan lokal menjadi pangan sumber karbohidrat sandingan beras dan terigu (Badan Ketahanan Pangan 2012). Kemunculan Program MP3L di Desa Pancasila didukung dengan penyediaan mesin produksi Beras Siger oleh Badan Ketahanan Pangan yang dikelola oleh pihak pengelola di desa setempat.

Berkaitan dengan pencapaian tujuan ke dua dari program, keberadaan mesin produksi Beras Siger di Desa Pancasila diharapkan terjadinya penyediaan bahan baku yang dapat selalu dipenuhi oleh petani ubi kayu di desa tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan petani ubi kayu guna memenuhi kebutuhan bahan baku Beras Siger adalah dengan memperluas alokasi lahan tanamnya untuk ditanami ubi kayu.

Munculnya Beras Siger sebagai sandingan pangan pokok beras, secara tidak langsung dapat dimanfaatkan pula guna menekan pengeluaran beras bagi petani ubi kayu di Desa Pancasila. Alokasi lahan petani untuk ditanami ubi kayu guna bahan baku Beras Siger sedikit banyak berpengaruh pada pola pangan petani itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh karena hasil panen ubi kayu yang diterima petani tidak seluruhnya dikomersilkan melainkan juga dikonsumsi sendiri oleh petani. Dengan demikian, maka petani ubi kayu dapat mengurangi porsi pengeluaran pangan, khususnya beras, dengan mengembalikan pola konsumsi pangannya ke pangan pokok lokal yang berbasis ubi kayu.

Kebutuhan produksi Beras Siger terhadap bahan baku ubi kayu menyebabkan petani ubi kayu di Desa Pancasila berperan serta dalam keberlanjutan program. Terdorong dari tujuan pertama program, yaitu terjadinya diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal, maka pola konsumsi pangan petani ubi kayu sebagai penyedia bahan baku Beras Siger dan penerima Beras Siger perlu diamati untuk mengukur adopsinya terhadap pelaksanaan program di Desa Pancasila.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan pola alokasi lahan, membandingkan pengeluaran beras rumah tangga dan membandingkan pola konsumsi pangan antara petani ubi kayu di desa pelaksana dan desa non pelaksanaan Program MP3L guna melihat pengaruh dari adanya Program MP3L di Kabupaten Lampung Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Bulan Maret 2014 hingga Bulan April 2014 di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi penelitian ditentukan di Desa Pancasila yang dipilih secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi pelaksana Program MP3L. Desa Pancasila ditentukan sebagai desa pelaksana program, sedangkan Desa Negara Ratu merupakan desa non pelaksana program. Pemilihan Desa Negara Ratu didasari oleh alasan bahwa desa tersebut memiliki karakteristik pola budidaya yang hampir sama untuk dijadikan sebagai desa pembanding karena letaknya yang hampir berdekatan dengan Desa Pancasila.

Responden pada penelitian merupakan petani ubi kayu. Jumlah petani ubi kayu yang terdapat di Desa Pancasila sebanyak 22 orang. Karena jumlah yang sedikit dan mudah dijangkau maka digunakan metode sensus untuk memperoleh data dalam penelitian (Usman dan Akbar dalam Ladia 2009) di desa tersebut. Untuk alasan kesetaraan proporsi jumlah responden, maka ditentukan sebanyak 22 petani ubi kayu di Desa Negara Ratu yang dipilih secara acak. Dengan demikian, jumlah seluruh responden dalam penelitian sebanyak 44 petani ubi kayu. Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan mengembangkan metode wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur terkait dan data instansi.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung dan mengukur alokasi lahan tanam ubi kayu dan pengeluaran beras responden di kedua desa penelitian. Data mengenai alokasi lahan tanaman ubi kayu, pengeluaran beras dan pola konsumsi pangan oleh responden di kedua desa penelitian diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun secara tabulasi untuk dideskripsikan sebagai suatu perbandingan. Demikian pula analisis kuantitatif

dikembangkan untuk menganalisis pola konsumsi pangan responden. Kandungan energi setiap jenis makanan yang dikonsumsi dihitung dengan rumus (Hardinsyah dan Martianto 1989):

$$KG_{ij} = \frac{B_j}{100} \times G_{ij} \times \frac{BDD_j}{100} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan:

KG_{ij} = Kandungan gizi (energi) jenis makanan yang dikonsumsi

B_j = Berat makanan yang dikonsumsi (gram)

G_{ij} = Kandungan gizi (energi) dalam 100 gram jenis makanan yang dikonsumsi

BDD_j = Persen jenis makanan yang dapat dimakan

Rata-rata jumlah konsumsi berbagai makanan kemudian dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok pangan dan dihitung skor PPH-nya untuk kemudian dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alokasi Lahan Tanam Ubi Kayu

Alokasi lahan untuk ditanami padi oleh petani ubi kayu di Desa Pancasila lebih luas dibandingkan dengan jenis tanaman pangan lainnya. Sebaliknya terjadi di Desa Negara Ratu. Pengalokasian lahan terbesar diberikan untuk ditanami ubi kayu. Sebesar 89 persen (38,35 ha) dari total luas lahan yang diusahakan di Desa Negara Ratu dialokasikan untuk ditanami ubi kayu, sedangkan pengalokasian lahan untuk ditanami ubi kayu di Desa Pancasila hanya sebesar 37 persen (9,25 ha).

Usahatani padi yang diterapkan di kedua desa merupakan padi sawah, sedangkan ubi kayu yang dibudidayakan di kedua desa merupakan ubi kayu jenis manis dan ubi kayu jenis pahit. Perbedaan pola alokasi lahan antara petani ubi kayu di kedua desa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal.

Kebutuhan akan hasil panen tanaman budidayanya menjadi salah satu faktor internal yang memengaruhi petani dalam mengalokasikan lahannya. Hasil panen yang diterima responden tidak seluruhnya dijual, sedikit diantaranya akan digunakan responden untuk dikonsumsi sendiri. Kondisi fisik lahan dan jaminan pasar terhadap hasil panen menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi perbedaan pola alokasi lahan oleh petani ubi kayu di kedua desa penelitian.

Tabel 1. Pola alokasi lahan petani ubi kayu pelaksana dan non pelaksana Program MP3L di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014

Alokasi Lahan	Pelaksana (ha)	Pelaksana (%)	Non Pelaksana	
			(ha)	(%)
Ubi kayu	9,25	35,92	38,35	89,08
Padi	15,75	61,17	4,70	10,92
Jagung	0,75	2,91	-	-
Jumlah	25,75	100	43,50	100

Petani ubi kayu di Desa Negara Ratu sebagian besar mengalokasikan lahan tanam ubi kayunya untuk ubi kayu jenis pahit. Di Desa Pancasila, petani ubi kayu yang mengalokasikan lahan guna ditanami ubi kayu jenis manis lebih banyak ditemukan. Pelaksanaan Program MP3L di Desa Pancasila didasari adanya ketersediaan ubi kayu jenis manis di desa tersebut, mengingat bahan baku utama pembuatan Beras Siger adalah ubi kayu jenis manis.

Terdapat beberapa pertimbangan yang mempengaruhi keputusan petani ubi kayu di Desa Pancasila dalam memilih jenis ubi kayu yang akan diusahakan di lahan pertaniannya. Pertimbangan yang pertama adalah kebutuhan pasar. Petani ubi kayu di Desa Negara Ratu memiliki kecenderungan untuk mengomersilkan seluruh hasil panen ubi kayunya guna kebutuhan pabrik tapioka. Oleh karena itu, keputusan dalam memilih jenis ubi kayu yang diusahakan disesuaikan dengan kebutuhan pabrik tapioka, yaitu ubi kayu jenis pahit. Berbeda dengan petani ubi kayu Desa Pancasila yang cenderung mengalokasikan hasil panen ubi kayunya untuk dikonsumsi, baik oleh sendiri maupun oleh orang lain. Perbedaan pemanfaatan ubi kayu tersebut menyebabkan petani ubi kayu di Desa Pancasila lebih banyak mengalokasikan lahan tanamnya untuk ditanami ubi kayu jenis manis dibandingkan di Desa Negara Ratu. Hal ini dikarenakan, ubi kayu jenis pahit mengandung racun yang tidak aman untuk dikonsumsi manusia tanpa melalui proses pengolahan yang baik dan benar.

Pertimbangan kedua adalah tidak adanya jaminan pembelian hasil panen. Adanya program MP3L yang secara tidak langsung mengikutsertakan petani ubi kayu dalam pelaksanaannya, tidak diikuti dengan kepastian pembelian hasil panen oleh pihak pengelola. Bahan baku Beras Siger yang berupa ubi kayu jenis manis diperoleh pihak pengelola program dari tengkulak, bukan dari petani ubi kayu di Desa Pancasila secara langsung.

Pihak pengelola tidak memiliki kerja sama yang baik dengan petani ubi kayu di desa tersebut, sehingga menyebabkan petani ubi kayu tidak memiliki kepastian pasar apabila mengalokasikan lahannya untuk ditanami ubi kayu jenis manis. Oleh karena itu, keputusan dalam mengalokasikan lahan tanam ubi kayu jenis manis di Desa Pancasila tidak dipengaruhi oleh adanya Program MP3L, melainkan karena kebutuhan untuk mengonsumsi ubi kayu.

Pengeluaran Beras Rumah Tangga

Program MP3L di Desa Pancasila tidak mampu menekan pengeluaran beras bagi rumah tangga petani ubi kayu di desa tersebut. Meski nilai pengeluaran terhadap beras oleh rumah tangga petani ubi kayu di Desa Pancasila lebih rendah dibandingkan di Desa Negara Ratu, namun nilai tersebut tidak menunjukkan selisih yang cukup signifikan mengingat Desa Pancasila merupakan desa dimana pengolahan Beras Siger dilakukan. Baik sebelum maupun sesudah adanya Program MP3L, rumah tangga petani ubi kayu di Desa Pancasila cenderung memiliki pola pengeluaran beras yang sama. Demikian halnya pola pengeluaran pangan yang terjadi di Desa Negara Ratu yang hampir sama setiap tahunnya.

Badan Pusat Statistik (2013) menyatakan bahwa rata-rata konsumsi beras oleh rumah tangga di Indonesia hingga tahun 2012 sebesar 103,71 kg per kapita per tahun, sedangkan rata-rata tingkat konsumsi beras oleh rumah tangga petani ubi kayu di Desa Pancasila mencapai 107,29 kg per kapita per tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa jumlah konsumsi beras rumah tangga petani ubi kayu di Desa Pancasila masih cukup tinggi, bahkan melampaui jumlah konsumsi beras rata-rata nasional. Dengan demikian, adanya Beras Siger di Desa Pancasila dirasa belum cukup mempengaruhi responden di desa pelaksana Program MP3L untuk mengurangi proporsi konsumsi beras rumah tangganya (Tabel 2).

Kegiatan produksi Beras Siger dilakukan di desa pelaksana, namun pemasaran produksi tidak terjadi secara merata di desa pelaksana. Pemasaran Beras Siger lebih banyak dilakukan di Kecamatan Jati Agung disebabkan oleh minat beli masyarakat di wilayah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan minat beli masyarakat di Desa Pancasila. Petani ubi kayu di Desa Pancasila lebih memilih untuk mengolah sendiri hasil panen ubi kayunya menjadi tiwul untuk dikonsumsi dibandingkan harus membeli Beras Siger. Harga jual Beras Siger

Rp7.000/kilogram dianggap terlalu tinggi dibandingkan harga jual tiwul pada umumnya di pasaran.

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan pada petani ubi kayu maupun masyarakat di desa pelaksana Program MP3L mengakibatkan rendahnya minat beli masyarakat terhadap Beras Siger. Rasa dan bentuk Beras Siger yang menyerupai tiwul membuat mereka memilih untuk mengolah sendiri ubi kayu menjadi tiwul dibandingkan harus membeli. Hanya masyarakat maupun responden yang bertempat tinggal dekat dengan rumah pengolahan Beras Siger saja yang umumnya membeli produk tersebut. Hal ini juga yang menjadi alasan didistribusikannya Beras Siger ke luar Desa Pancasila oleh pihak pengelola.

Pola Konsumsi Pangan

Harper, Deaton, dan Driskel (1986) menyatakan bahwa pola konsumsi pangan merupakan suatu susunan dari berbagai bahan dan hasil olahannya yang biasa dimakan seseorang yang tercermin dalam jumlah, jenis, frekuensi, dan sumber bahan makanan. Berbeda dengan kebutuhan hidup lainnya, kebutuhan pangan hanya dibutuhkan secukupnya sebab kelebihan dan kekurangan pangan akan menimbulkan masalah gizi dan penyakit (Suhardjo dalam Hanani 2009).

Pola konsumsi pangan seseorang maupun kelompok masyarakat dapat dievaluasi menggunakan Pola Pangan Harapan (PPH). Pola pangan harapan merupakan suatu pegangan kecukupan pangan yang diwujudkan dalam susunan beragam pangan dengan masing-masing tingkat kontribusinya untuk mengetahui lebih jauh kecukupan ketersediaan energi juga disertai dengan komposisi pangan yang beragam, bergizi dan seimbang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pola konsumsi pangan petani ubi kayu di kedua desa penelitian dikaji melalui skor PPH.

Tabel 2. Rata-rata nilai pengeluaran beras rumah tangga petani ubi kayu di desa pelaksana dan non pelaksana program MP3L di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014

Keterangan	Pelaksana (kapita/tahun)	Non Pelaksana (kapita/tahun)
Jumlah (kg)	107,29	137,5
Nilai (Rp)	858.303,03	1.044.121,77

Perolehan skor PPH dari petani ubi kayu di kedua desa penelitian belum memenuhi standar yang diharapkan, yaitu 100. Skor PPH petani ubi kayu di Desa Pancasila sebesar 87,8, sedangkan di Desa Negara Ratu sebesar 80,5 (Tabel 3). Meski belum mencapai skor yang diharapkan, namun skor PPH di Desa Pancasila telah melebihi skor PPH penduduk Provinsi Lampung yang mencapai 84,3 pada tahun 2013 (Badan Ketahanan Pangan 2014). Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi penganekaragaman jenis pangan yang di konsumsi oleh petani ubi kayu di Desa Pancasila.

Lebih tingginya skor PPH petani ubi kayu di Desa Pancasila dibandingkan di Desa Negara Ratu dipengaruhi oleh lebih tingginya konsumsi sayur dan buah yang dimakan oleh petani di Desa Pancasila. Selain itu, skor kelompok pangan kacang-kacangan di Desa Pancasila juga mendukung tingginya skor PPH yang dicapai.

Berdasarkan Indriani (2007) skor PPH untuk kelompok pangan padi-padian yang disarankan maksimal sebesar 25,0 dari total skor 100. Skor PPH pada kelompok pangan padi-padian oleh petani ubi kayu di Desa Pancasila sebesar 20,6 dan di Desa Negara Ratu sebesar 22,1. Skor PPH tersebut menunjukkan bahwa konsumsi beras oleh petani ubi kayu di Desa Pancasila dan Desa Negara Ratu lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian skor PPH kelompok pangan padi-padian penduduk Provinsi Lampung yang mencapai skor maksimal 25,0 (Badan Ketahanan Pangan 2014).

Tabel 3. Skor PPH petani ubi kayu di desa pelaksana dan non pelaksana Program MP3L di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2014

Kelompok Pangan	PPH Pelaksana	PPH Non Pelaksana	PPH Ideal
– Padi-padian	23,9	25,0	25,0
– Umbi-umbian	2,5	2,5	2,5
– Hewani	24,0	24,0	24,0
– Minyak dan lemak	2,0	2,0	5,0
– Buah dan biji berminyak	0,0	0,0	1,0
– Kacang-kacangan	8,5	7,8	10,0
– Gula	1,3	2,3	2,5
– Sayur dan buah	25,6	17,0	30,0
– Lain-lain	0,0	0,0	0,0
Total	87,8	80,5	100,0

Pengurangan konsumsi beras yang terjadi disebabkan oleh substitusi beras dengan tiwul yang diolah sendiri yang dilakukan oleh petani ubi kayu di kedua desa penelitian. Hal ini didukung oleh skor PPH ideal untuk kelompok pangan umbi-umbian di kedua desa penelitian telah mencapai skor maksimal, yaitu sebesar 2,5. Angka tersebut menunjukkan peningkatan jumlah umbi-umbian yang dikonsumsi bila dibandingkan dengan skor PPH kelompok pangan umbi-umbian penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2013 yang hanya mencapai angka 0,9 (Badan Ketahanan Pangan 2014). Meski tingginya skor PPH di Desa Pancasila terjadi karena substitusi beras oleh umbi-umbian, namun hal ini tidak dipengaruhi oleh karena keberadaan Program MP3L yang terlaksana di desa tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan, tingginya skor PPH di Desa Pancasila terjadi karena pensubstitusian beras dengan tiwul olahan sendiri bukan dengan Beras Siger yang merupakan produk dari Program MP3L. Beras Siger merupakan suatu produk pangan yang sangat inovatif dalam penciptaannya di tengah pola konsumsi pangan masyarakat yang belakangan sangat bergantung pada nasi sebagai pangan pokok sehari-hari. Pola konsumsi petani ubi kayu di Desa Pancasila yang secara umum telah terbiasa untuk mengonsumsi tiwul tidak didukung oleh adanya Beras Siger di desa tersebut. Pencapaian pengurangan konsumsi beras seharusnya dapat didukung dengan adanya Beras Siger, namun karena kegiatan produksi Beras Siger tidak rutin terjadi, maka tidak jarang terjadi kekosongan pasokan Beras Siger. Hal tersebut menjadi faktor penghambat pencapaian tujuan Program MP3L melalui munculnya Beras Siger untuk mengembalikan pola konsumsi pangan petani ubi kayu di Desa Pancasila, ke pola pangan berbasis pangan lokal.

KESIMPULAN

Alokasi lahan tanam ubi kayu di Desa Negara Ratu lebih luas dibandingkan dengan di Desa Pancasila. Pengalokasian lahan untuk ditanami ubi kayu cenderung disebabkan oleh kebutuhan petani untuk mengonsumsi ubi kayu hasil panennya dan adanya jaminan pasar. Selain itu, Program MP3L belum dapat menekan pengeluaran beras petani ubi kayu di Desa Pancasila melalui Beras Siger. Hal tersebut dibuktikan melalui perbedaan yang tidak terlalu besar pada rata-rata pengeluaran beras rumah tangga di Desa Pancasila dan di Desa Negara Ratu. Nilai rata-rata pengeluaran beras rumah tangga di Desa Pancasila sebesar

Rp858.303,03 per kapita per tahun, sedangkan rata-rata pengeluaran beras rumah tangga sebesar Rp1.044.121,77 per kapita per tahun. Skor PPH petani ubi kayu di Desa Pancasila (87,8) lebih tinggi dibandingkan dengan skor PPH petani ubi kayu di Desa Negara Ratu (80,5). Pengurangan konsumsi beras di Desa Pancasila telah terjadi namun bukan disebabkan oleh pensubstitusian beras terhadap Beras Siger, melainkan terhadap tiwul hasil olahan sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani M. 2010. Diversifikasi Pangan Pokok Mendukung Swasembada Beras. *Prosiding Pekan Serealia Nasional*. ISBN: 978-979-8940-29-3.
- Badan Ketahanan Pangan. 2012. Program dan Kegiatan 2013 Mendukung Target Diversifikasi Konsumsi Pangan. *Disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) di Jakarta, 23 Mei 2012*. Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan. 2014. *Angka Justifikasi Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Lampung Tahun 2013*. Bandar Lampung.
- BPS [Badan Pusat Statistik]. 2013. Buletin Konsumsi Pangan. *Buletin Konsumsi Pangan Edisi 4 (2)*. <http://pusdati.setjen.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/03.Buletin-KonsumsiTW2-2013.pdf>
- Hanani N. 2009. *Diversifikasi Konsumsi Pangan*. <http://nuhfil.lecture.ub.ac.id/files/2009/03/8diversifikasi-konsumsi-pangan-8.pdf> [17 Februari 2014].
- Hardinsyah dan Martianto D. 1989. *Cara Menghitung Angka Kecukupan Energi dan Protein serta Penilaian Mutu Gizi Konsumsi Pangan*. Wirasari. Jakarta.
- Harper LJ, Deaton BJ dan Driskel JA. 1986. *Pangan Gizi dan Pertanian*. Diterjemahkan oleh Suhardjo. UI Press. Jakarta.
- Indriani Y. 2012. *Gizi dan Pangan*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ladia F. 2009. Pengaruh Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Direktorat Pendidikan Madrasah. <http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/127612T%2026403Pengaruh%20motivasiMetodelogi.pdf> [26 Februari 2014].